

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA TUALANG KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**



ANGGI UTAMI

10975005792

PROGRAM S.1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2013

SKRIPSI

**ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DI DESA TUALANG KECAMATAN
TUALANG KABUPATEN SIAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Jurusan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



ANGGI UTAMI
10975005792

**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAUM
2013**

ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA TUALANG KECAMATAN TUALANG

ABSTRAK

Oleh: ANGGI UTAMI

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu institusi yang berada sejajar dengan pemerintahan desa, artinya BPD dan Pemerintahan Desa memiliki hubungan koordinasi. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD mempunyai dua fungsi pokok yaitu *pertama* menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, *kedua* menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut pengamatan penulis, fungsi (Badan Permusyawaratan Desa) BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kurang berjalan dengan baik karena terjadi kevakuman, hal ini terjadi karena (1) Kurangnya pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, (2) Kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPD serta masyarakat setempat. Sebagai upaya untuk memahami permasalahan ini, maka dilakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Mengapa pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tualang belum optimal”. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah anggota BPD sebanyak 11 orang, Aparat desa sebanyak 9 orang dan masyarakat sebanyak 97 orang. Untuk keperluan penelitian ini diperlukan yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan agar data yang diinginkan akurat, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Angket / Kuisioner. Setelah data terkumpul maka di kelompokkan menurut jenis dan sumber data kemudian dianalisa secara *Deskriptif Kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik, yang meliputi fungsi meliputi peraturan desa sebanyak 61 orang atau 50,86% dan fungsi menampung aspirasi masyarakat sebanyak 70 orang atau 59,82%. Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat terlihat bahwa fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan berbagai faktor yang meliputi, Sarana dan prasarana yang belum memadai serta Kurangnya komunikasi dan partisipasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis diberi kesehatan serta kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul : **“Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** untuk melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orangtua yang sangat penulis cintai, Bapak **Ahmad Jais** dan Mama **Sri Rukmini** yang telah mengorbankan segala tenaga, upaya, kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat diungkapkan lagi selain rasa terima kasih.

2. Bapak **Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA** selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak **DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
4. Bapak **Afrizal, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak **Rusdi, S.Sos, MA** selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara serta pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan/ti Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah banyak membantu serta memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak **H. Abbas Gidang** selaku Ketua BPD Tualang dan Bapak **Juprianto, S.Sos** selaku Kepala Desa Tualang, serta seluruh Anggota BPD, Aparat Desa dan Masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk kedua adikku **Fikri Ardian** dan **Muhammad Zacky Faizal** yang telah memberikan motivasi dan doa untuk penulis. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Bapak.
9. Sepupu yang tersayang **Riza Purnamasari** dan **Mutya Radifta Fitri**, serta sahabat di kost yang selalu membantu yaitu **Adli, Fadly** dan **Ian**, serta tak lupa juga untuk adek-adek tersayang **Fadila Sagita** dan **Holly**. Semoga semuanya cepat lulus dan kita tetap bersahabat selamanya.

10. Teman-teman seperjuangan yang ada di Jurusan Administrasi Negara lokal

A angkatan 2009 : **Arya Riska Alni S.AP, Endah Setiyorini S.AP, Fitra Herlinda S.AP, Siti Fatimah Yulis**, Atika Haririya, Helmi Marlina S.AP, Atma Ridha Ulva, Retno Palupi S.AP, Nila Yustia Nengsi, Sri Wahyuningsih S.AP, Rika Mayasari S.AP, Arnila Wardhani S.AP, Liati S.AP, Yuni Sara S.AP, Fina Erfiyanti S.AP, Muhammad Aryadi S.AP, Bima Pratomo S.AP, Maulana S.AP, Zulkarnain S.AP, dan Khoris S.AP. Serta Halimah S.AP, Wan Aisyah Ayu S.AP, Wirda Afni S.AP, Merialita S.AP, Rosi Andela S.AP dan Irma Fitriani S.AP.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin..

Pekanbaru, Februari 2013

Penulis,

ANGGI UTAMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Otonomi Daerah	14
2.2 Otonomi Desa	17
2.3 Pemerintahan di Tingkat Desa	21
2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kesimpulan	23
2.5 Masyarakat	26
2.6 Definisi Konsep	28
2.7 Konsep Operasional	29
2.8 Teknik Pengukuran	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Populasi dan Sampel	32

3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
3.6 Teknik Analisa Data	36

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Tualang	37
4.2 Penduduk	38
4.3 Pemerintahan Desa	38
4.4 Pendidikan	40
4.5 Agama	42
4.6 Perekonomian	43
4.7 Budaya	44
4.8 Kesehatan	45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	46
5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	49
5.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	73

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah

desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan

perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;

- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 yang telah disebutkan diatas, BPD di Desa Tualang dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Tualang harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Di dalam pasal 209 UU No. 32 Tahun 2004 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan peraturan desa (Perdes) bersama kepala desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sehingga menghasilkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *good governance*.

Kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan mampu memperkuat posisi Kabupaten Siak dalam mengembangkan dan mengatur pembangunan di daerah tersebut. Ukuran efektifitas suatu peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tidak hanya dapat diletakkan dalam tolak ukur angka-angka kemajuan statistik saja (kuantitatif), tetapi juga harus dilihat sejauh mana keberpihakan peraturan itu terhadap kepentingan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat khususnya menyangkut keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Untuk itu Desa Tualang dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang merupakan mitra Pemerintahan Desa. Sampai saat ini pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) telah memasuki tahun ketujuh belas begitu juga dengan Badan Permusyawaratan Desa Tualang yang dibentuk pada tanggal 15 Mei 1995. Dan selama itu pula fungsi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa, membuat Peraturan Desa bersama-sama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Di desa Tualang ini, pada tahun 2012 telah membuat beberapa peraturan desa yaitu:

1. Peraturan Desa tentang Pasar. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban pasar yang ada di Desa Tualang.
2. Peraturan desa tentang pelaksanaan acara bersih desa yang diadakan satu bulan sekali. Acara bersih desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Biasanya akan ada penjelasan tentang waktu dan proses pelaksanaan dari acara bersih desa ini dan siapa saja orang yang akan ditunjuk untuk memimpin acara tersebut.

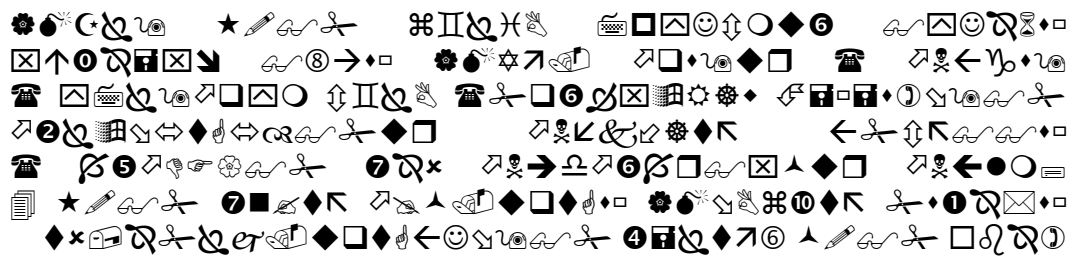
Setelah berakhirnya masa jabatan BPD tahun 2001-2007, kemudian di lantik kembali anggota BPD periode selanjutnya tahun 2007-2013 pada tanggal 15 Mei 2007 yang beranggotakan 11 orang. Pelaksanaan penetapan anggota BPD dilaksanakan dengan membentuk Panitia Musyawarah yang terdiri dari Pemerintahan Desa, yang disahkan dengan Surat Keputusan Camat atas nama Bupati. Anggota BPD periode 2007-2013 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tentunya dalam melaksanakan fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan, pihak Badan Permusyawaratan Desa melakukan musyawarah dengan mengadakan rapat, hal ini sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an yang mengajarkan bermusyawarah dalam mengambil suatu ketetapan pada proses penyelenggaraan pemerintah. Firman Allah dalam Surah Ali Imran Ayat 159:



Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepada-Nya.

Dari firman Allah di atas jelas menegaskan kepada umatnya bahwa dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Hendaknya mereka mengadakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Tualang dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Tualang dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Tualang dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja

pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keinginan aparat desa beserta masyarakat untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD itu sendiri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari 2012	Anggota BPD	11	6	5
		Aparat Desa	9	4	5
		Masyarakat	50	22	28
2	April 2012	Anggota BPD	11	5	6
		Aparat Desa	9	3	6
		Masyarakat	50	31	19
3	Juli 2012	Anggota BPD	11	7	4
		Aparat Desa	9	5	4
		Masyarakat	50	24	26

Sumber: Kantor BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kab. Siak 2012

Dari tabel diatas dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali kegiatan rapat terakhir, jumlah yang hadir lebih kecil dari yang tidak hadir. Hal ini disebabkan kurangnya hubungan komunikasi diantara sesama anggota BPD, Aparat Desa serta masyarakat, sehingga terjadi kevakuman dan tentunya bisa menghambat pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Kurangnya pengawasan tentang penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang selalu telat dari jadwal yang ditentukan.

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Kepala Desa Bapak Juprianto S.Sos (Wawancara, Januari 2013) mengatakan bahwa penyerahan LPJ Kepala Desa yang tidak tepat waktu dan tidak ada teguran dari BPD tersebut. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan BPD terhadap proses penyerahan LPJ Kepala Desa sehingga kinerja pemerintahan desa dinilai masih rendah dan bisa menghambat penerapan program yang telah dibuat.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa.

BPD di Desa Tualang menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi

kebijakan dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tualang dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Isi dari Bab ini terdiri dari Otonomi Daerah, Desa, Otonomi Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tugas dan Fungsi BPD, Masyarakat, Definisi Konsep, Definisi Operasional, Teknik Pengukuran dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini peneliti menyajikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian. Seperti Sejarah Singkat Desa Tualang, Geografis Desa Tualang, Penduduk, Pemerintahan, Pendidikan, Agama, Mata Pencaharian dan Budaya.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini.

BAB VI : PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Haw Widjaja 2002:98). Menurut Inu Kencana (2002:94) yang berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya menurut Albert (2002:11) otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjadi isi rumah tangga daerah. Otonomi daerah mengandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus, dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri otonomi daerah juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah berlandaskan pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar dalam pasal 18 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

1.1.1 Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah

Isi yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No.32/2004 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan atas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi

berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut UU No. 32/2004 kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah Kabupaten atau daerah Kota.

1.1.2 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berdasarkan pada Undang-undang No. 32/2004, prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, sedangkan Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4. Harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7. Harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menunjuk tiga pola otonomi, yaitu: otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi pelestarian, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebenarnya desa merupakan bagian yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan deesa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu unsur-unsur desa. Menurut Budi Santosa (2003:13), unsur-unsur tersebut ialah:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.
2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pemcaharian penduduk desa setempat.

3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau *tatal society*.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja (2003:51) adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.3 Pemerintahan di Tingkat Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 8 tahun 2006, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks desa, The Liang Gie (1982:25) mendefinisikan tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintahan Desa dan BPD), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintahan desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan hak dari suatu pemerintahan desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintahan desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintahan desa telah menjalankan perannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan

kewenangan itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Dari sini terlihat bahwa tata pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik.

2.3.1 Perwujudan Tata Pemerintahan Desa yang Baik

Konsep tata pemerintahan tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota, tetapi yang lebih penting lagi di tingkat desa. Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah yang untuk desa diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan perwujudan salah satu prasyarat yang dibutuhkan, tetapi bukan berarti bahwa regulasi ini sudah mencukupi bagi terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik.

Untuk mengaplikasikan pemberdayaan masyarakat desa yang sesungguhnya, dibutuhkan pengembangan kelembagaan secara menyeluruh yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Proses pembangunan, yang meliputi formulasi kebijakan (*policy formulation*), perencanaan (*planning*), penganggaran (*budgeting*), dan penetapan peraturan (*legislation*);
2. Peranan dan tanggung jawab pemerintahan desa, dan masyarakat;
3. Sistem organisasi, yang meliputi lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat;
4. Insentif dalam pembangunan, yang mampu meningkatkan inovasi masyarakat desa dalam pembangunan;
5. Kerangka legal, yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat desa yang beranekaragam.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus

berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih baik.

2.4.1 Tugas dan Fungsi BPD

Tugas dan fungsi BPD di kabupaten Siak khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD
 - a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datang dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan

persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- f. Menyusun tata tertib BPD;
- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

2.5 Masyarakat

Menurut Selo Sumardjan (2004:32) masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal berikut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

2.5.1 Ciri-Ciri Masyarakat Desa (karakteristik)

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli Sosiologi “Talcott Parson” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. *Orientasi Kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afktifitas. Yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. (lawannya Universalisme)
4. *Askripsi* yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang merupakan kebiasaan atau keturunan. (lawannya prestasi)

5. *Kekabaran (diffuseness)*. Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

2.6 Definisi Konsep

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa setempat, yang berfungsi:
 - a. Fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - b. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Pelaksanaan fungsi adalah realisasi dari apa yang telah direncanakan atau yang ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.7 Konsep Operasional

Konsep Operasional	Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.	a. Membuat rancangan peraturan desa. b. Merumuskan dan menetapkan peraturan desa.	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik
	2. Otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa	2. Menampung aspirasi masyarakat.	a. Menerima aspirasi-aspirasi masyarakat. b. Menyalurkan setiap aspirasi masyarakat untuk	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik

	sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		dijadikan kebijakan.	
--	---	--	----------------------	--

2.8 Teknik Pengukuran

Dalam pengukuran ini terdapat satu variabel yang akan diukur yaitu fungsi BPD. Adapun variabel fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikatornya sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

- a. Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang ikut terlibat dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Kurang Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang tidak dapat menjalankan salah satu dari merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- c. Tidak Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang tidak terlibat sama sekali dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

- a. Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang turun langsung ke lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Kurang Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang hanya dapat melaksanakan salah satu dari menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c. Tidak Baik : Apabila Badan Permusyawaratan Desa Tualang tidak dapat menjalankan sama sekali fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian penulis.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Jalan Hang Tuah No. 01 Desa Tualang Kecamatan Tualang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono 2005:90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota BPD Desa Tualang sebanyak 11 orang, Perangkat Desa Tualang 9 orang serta masyarakat Desa Tualang yang diwakili oleh Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3.615 KK.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi ini (Sugiyono 2005: 91).

Menyadari jumlah populasi yang terlalu banyak, yakni masyarakat Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka penulis menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dimana:

n = Sampel

N = Populasi

e = Batas ketelitian (nilai kritis) yang diinginkan

(Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel populasi)

Dengan jumlah populasi (masyarakat) sebanyak 3.615 KK dan batas ketelitian diambil sebesar 10% maka di dapatkan sampel sebesar:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N.e^2} \\ &= \frac{3.615}{1 + 3615 (10\%)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{3.615}{1 + 3615 (0,01)}$$

$$= \frac{3.615}{1 + 36,15}$$

$$= \frac{3.615}{37,15}$$

$$= 97,16 = 97 \text{ orang (digenapkan jumlahnya)}$$

Jadi, populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 : Tabel Populasi dan Sampel Dalam Penelitian

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Aparat Desa	9	9	100%
2.	Anggota BPD	11	11	100%
3.	Masyarakat	3.615	97	100%
Jumlah		3.638	117	100%

Sumber: *Data Lapangan 2012*

Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari semua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 11 orang, Aparat Desa sebanyak 9 orang serta masyarakat Desa Tualang sebanyak 97 orang. Untuk sampel anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparat Desa, penulis menggunakan teknik sensus, yaitu mengambil jumlah secara keseluruhan. Sedangkan untuk sampel masyarakat, penulis memakai rumus Slovin seperti yang telah dikemukakan di atas.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber melalui penelitian lapangan berupa informasi dan wawancara agar memperoleh jawaban yang relevan. Data primer tersebut menyangkut tentang identitas responden dan tanggapan masyarakat terhadap fungsi BPD.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang diteliti mengenai demografi Desa Tualang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi BPD pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang.

2. Wawancara

Dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3. Angket

Cara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menyangkut dengan masalah yang diteliti dengan cara penyebaran daftar pertanyaan (angket) beserta alternatif jawabannya kepada seluruh sampel.

3.6 Teknik Analisa Data

Untuk menguji kebenaran, penelitian ini berbentuk kualitatif, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif, yaitu setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan yang sifatnya mendukung dan menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggambarkan secara utuh kenyataan mengenai fungsi BPD, kemudian didapat diambil kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Geografis Desa Tualang

Desa Tualang merupakan salah satu desa diantara 6 desa yang berada di kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan luas wilayah 93,75 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) Dusun yaitu: Dusun Merbau, Dusun Surya, Dusun Suka Damai.

Secara administrasi desa Tualang Kecamatan Tualang berbatasan dengan 4 (empat) desa. Ditinjau dari letak geografisnya Desa Tualang mempunyai batas wilayah, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Gasib
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maredan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinang Sebatang

Sedangkan jarak dari Kabupaten dan Propinsi adalah sebagai berikut:

1. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 90 km.
2. Jarak dari pusat pemerintahan Propinsi 60 km.

Desa Tualang beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Tualang sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

4.2 Penduduk

Masyarakat Desa Tualang merupakan masyarakat yang dihuni oleh suku bangsa melayu. Berdasarkan data statistik pada Kantor Desa Tualang Tahun 2012, jumlah penduduk Desa Tualang berjumlah 17.384 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 3.615 KK, terdiri dari laki-laki berjumlah orang dan perempuan orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Penduduk Desa Tualang Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	8.997	51,76%
2	Perempuan	8.387	48,25%
Jumlah		17.384	100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Tualang lebih didominasi oleh laki-laki dengan 8.997 orang (51,75%), sedangkan perempuan berjumlah 8.387 orang (48,25%).

4.3 Pemerintahan Desa

Desa Tualang merupakan desa yang berpedoman dan berlandaskan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dalam pelaksanaan tugasnya dibentuk oleh perangkat desa. Selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang selanjutnya dipimpin oleh kepala dusun, RW (Rukun Warga), dan dibawah RW ada RT (Rukun Tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jumlah aparat pemerintahan Desa Tualang dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

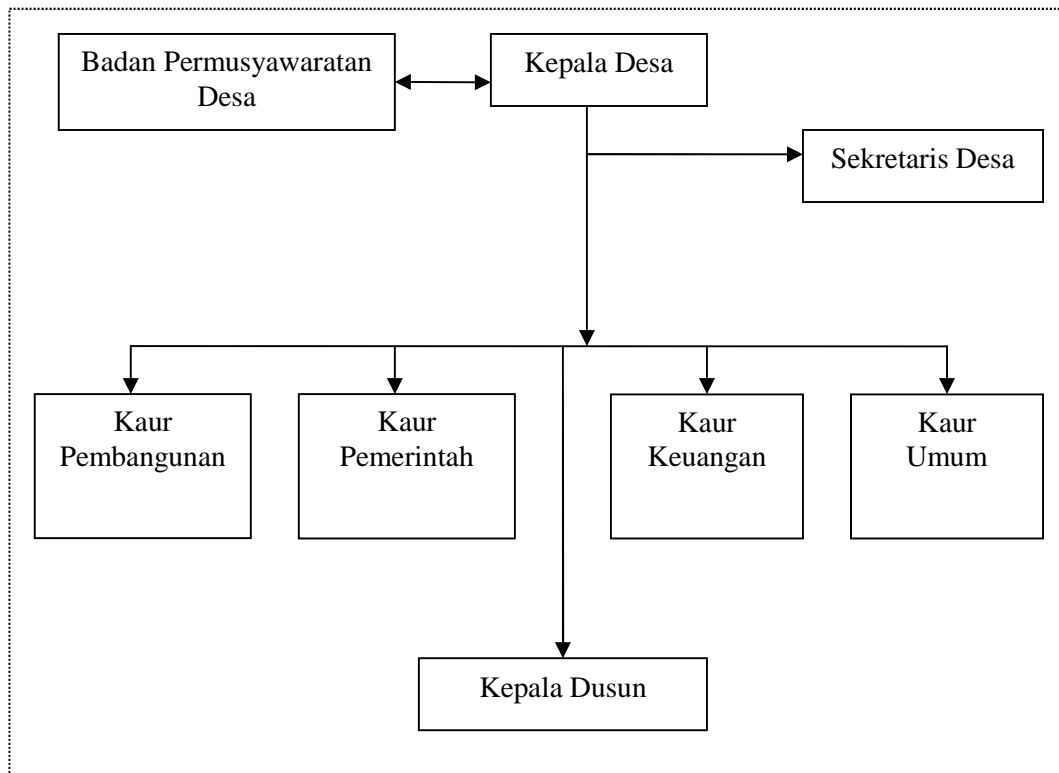
Tabel 4.2 Jumlah Aparat Pemerintah Desa Tualang

No	Aparat Pemerintah	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
3	Kepala Dusun	3
4	Kaur (Ketua Urusan)	4
Jumlah		9

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi pemerintahan desa, maka dijelaskan kedudukan, tugas dan fungsi unit-unit kerja dalam struktur pemerintahan desa sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Tualang



Sumber: Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Dari bagan diatas diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk melakukan Tugas dan Fungsinya, adapun Kepala Desa merupakan pemerintahan tertinggi di tingkat desa, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, kemudian di bawah Kepala Desa

terdapat 4 Kaur yang akan membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun keempat Kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan dan Kaur Umum. Dan dibawah Kaur ada Dusun. Untuk di Desa Tualang terdapat 3 Dusun, yaitu:

1. Dusun Merbau
2. Dusun Surya
3. Dusun Suka Damai

4.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan dalam segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum, sekolah agama di Desa Tualang. Dalam hal ini pemerintah juga tidak pernah berhenti untuk membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendidikan masyarakat agar masyarakat Desa Tualang tidak tertinggal dari desa-desa lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Tualang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	4 Buah
2	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	2 Buah
3	Sekolah Dasar Negeri	2 Buah
4	SMP/MTS	2 Buah
5	SMA/SMK	2 Buah
Jumlah		12 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan di Desa Tualang sudah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik, dari segi Taman Kanak-Kanak sampai ke Sekolah Menengah Atas (SMA), tinggal bagaimana mengelola manajemennya serta peran orang tua dalam menuntut anaknya untuk berlomba-lomba menggali ilmu agar generasi muda yang akan datang siap berkompetensi baik dalam agamis maupun akademis. Berikut ini adalah keadaan tingkat pendidikan penduduk Desa Tualang pada Tahun 2012:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tualang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak / Belum Tamat SD	1.390	8%
2	Tamat SD / Sederajat	1.911	11%
3	Tamat SMP / Sederajat	4.775	27%
4	Tamat SMA / Sederajat	5.674	33%
5	Tamat Diploma	1.032	6%
6	Tamat S1	2.591	15%
Jumlah		17.384	100%

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tualang sudah menuju kearah yang lebih baik dimana dominasi tingkat pendidikan yang tertera pada tabel diatas adalah tamatan SMA/Sederajat, sehingga masyarakat Desa Tualang sudah mengetahui sesuatu yang bernilai baik terhadap apa yang dikerjakan oleh masyarakat tersebut.

4.5 Agama

Masyarakat Indonesia lebih identik dengan pendekatan agama dalam masyarakat, ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilupakan. Bisa kita simak lagi uraian Pancasila, pada panca pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, sering terjadi konflik di Negara kita ini yang pemicunya adalah mengatasnamakan agama, sehingga dengan hal ini pemerintah pusat yang punya wewenang dalam pengaturan agama, agar bisa mengurangi *dikotomi* dari setiap daerah. Begitu juga di Desa Tualang, setiap agama adalah penting di dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Desa Tualang mayoritas beragama Islam.

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Desa Tualang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah di Desa Tualang

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8 Buah
2	Musholla	6 Buah
3	Gereja	1 Buah
Jumlah		15 Buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tualang Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tualang telah memiliki sarana yang cukup untuk masyarakat melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah seperti masjid dan musholla ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al-Qur'an, tempat pelaksanaan wirid agama dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua. Selain itu, gereja juga terdapat di Desa Tualang ini, karena pendatang

dari daerah lain juga berdomisili di Desa Tualang, yang mayoritas pendatang beragama Kristen.

4.6 Perekonomian

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tualang pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet dan kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian pada masyarakat Desa Tualang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tualang

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	1.975	11%
2	Pegawai Swasta	3.750	22%
3	Petani	1.408	8%
4	Nelayan	944	5%
5	Wiraswasta	1.782	10%
6	Tanggungan Orang Tua dll	7.525	43%
Jumlah		17.384	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tualang 2012

Dari data diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk desa Tualang masih dalam tanggungan orang tua dll yaitu sebanyak 7.525 orang (43%), kemudian paling banyak penduduk bekerja sebagai Pegawai Swasta yaitu sebanyak 3.750 orang (22%), Pegawai Negeri sebanyak 1.975 orang (11%), wiraswasta sebanyak 1.782 orang (10%), bekerja sebagai petani yaitu sebanyak 1.408 orang (8%), nelayan sebanyak 944 (5%).

4.7 Budaya

Masyarakat Desa Tualang pada dasarnya adalah suku Melayu. Sebagai masyarakat yang patuh pada tatanan pemerintahan, masyarakat Desa Tualang masih kental berpegang teguh pada adat istiadat yang berlaku.

Berikut ini beberapa tradisi atau budaya yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tualang, diantaranya:

1. Mandi Balimau

Mandi balimau merupakan tradisi masyarakat yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Tualang. Tradisi ini dilaksanakan ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan, dimana masyarakat berkumpul di tepi sungai Siak dengan tujuan membersihkan diri.

2. Musik Tradisional

Adapun musik tradisional masyarakat Desa Tualang adalah Kompang. Biasanya musik tradisional Kompang ini akan dimainkan pada acara-acara seperti: perkawinan, sunatan atau khitan, dan acara-acara adat lainnya.

3. Wirid Yasin

Masyarakat Desa Tualang telah lama membudayakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempererat tali persaudaraan seperti perkumpulan wirid yasin. Perkumpulan ini bertujuan untuk mendoakan masyarakat yang ditimpa musibah seperti meninggal dunia, dengan cara membacakan surah Yaasin secara bersama-sama.

4.8 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah Desa Tualang telah mendirikan satu buah Puskesmas yang buka setiap hari senin sampai dengan hari sabtu bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Desa Tualang yang membuka jam praktek dari hari senin sampai dengan hari sabtu, masih dirasakan kurang oleh masyarakat setempat, hal ini disebabkan karena masih kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena di kecamatan juga tersedia Puskesmas yang lebih besar dan lengkap, masyarakat juga lebih banyak yang berobat ke Puskesmas Kecamatan tersebut serta disebabkan jaraknya yang juga tidak terlalu jauh dari desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Demi menunjang keakuratan dalam penelitian sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka perlu disajikan identitas responden dari unsur anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Desa dan masyarakat yang menyangkut jenis kelamin, tingkat umur dan tingkat pendidikan sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian sekaligus tingkat pemahaman respondennya.

Berikut akan digambarkan identitas responden dilihat dari perbedaan jenis kelamin sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Jenis Kelamin

No	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	BPD	10	1	11	9,40%
2	Aparat Desa	8	1	9	7,69%
3	Masyarakat	75	22	97	82,90%
Jumlah				117	100 %

Sumber : *Data Olahan 2012*

Dari tabel 5.1 diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden penelitian ini adalah laki-laki. Dimana responden laki-laki dari BPD berjumlah 10 orang dan perempuan hanya 1 orang atau sekitar (9,40%), dari responden aparat desa 9 orang laki-laki dan 1 orang perempuan atau sekitar (7,69%) serta dari responden masyarakat berjumlah 97 orang atau (82,90%) yang terdiri dari 75 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur, peneliti membatasi responden yang memiliki tingkat umur dari 25 tahun sampai dengan 55 tahun, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2 Jumlah Responden (BPD, Aparat Desa dan Masyarakat) Menurut Tingkat Umur

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	25 s/d 35 Tahun	20	17,09%
2	36 s/d 50 Tahun	87	74,35%
3	51 s/d 60 Tahun	10	8,54%
Jumlah		117	100 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2012*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden didominasi dengan penduduk yang masih produktif yaitu berkisar dari umur 25 sampai 35 tahun yaitu sebanyak (17,09%) atau sebanyak 20 orang dan berkisar dari umur 36 sampai 50 tahun yaitu sebanyak (74,35%) atau sebanyak 87 orang. Sedangkan responden yang tidak produktif sebanyak (8,54%) atau sekitar 10 orang.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Jumlah Responden Badan Permusyawaratan Desa, menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	3	27,27%
4	Diploma	1	9,09%
5	Sarjana (S1)	6	54,54%
6	Pasca Sarjana (S2)	1	9,09%
Jumlah		11	100 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2012*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan responden dari Badan Permusyawaratan Desa Tualang tergolong baik, hal ini terlihat dari

mayoritas anggota BPD yang sudah berpendidikan Sarjana yaitu sebanyak 6 orang atau sekitar (54,54%).

Selanjutnya untuk melihat tingkat pendidikan dari kalangan Aparat Desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.4 Jumlah Responden Aparat Desa Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	1	11,11%
4	Diploma	1	11,11%
5	Sarjana (S1)	6	66,66%
6	Pasca Sarjana (S2)	1	11,11%
Jumlah		9	100 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas Aparat Desa memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 6 orang atau (66,66%). Hal ini berarti sudah cukup baiknya tingkat pendidikan aparat desa di desa tualang ini dengan ditandainya 6 orang yang bergelar sarjana.

Adapun untuk melihat tingkat pendidikan responden dari kalangan masyarakat dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.5 Jumlah Responden Masyarakat Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	16	16,49%
3	SMA	54	55,68%
4	Diploma	5	5,15%
5	Sarjana (S1)	20	20,61%
6	Pasca Sarjana (S2)	2	2,07%
Jumlah		97	100 %

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 97 responden dari kalangan masyarakat, di dominasi oleh masyarakat yang memiliki tingkat

pendidikan tamatan SMA yaitu sebanyak 54 orang. Hal ini berarti sudah cukup baiknya tingkat pendidikan masyarakat yang ditandai dengan tamatan SMA.

5.2 Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah. Peraturan daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dua Fungsi utama dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Fungsi Pertama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) dimana dalam menetapkan peraturan ini BPD bersama-sama dengan Kepala Desa melalui garis hubungan timbal balik melakukan diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Desa yang telah dibuat.

Di desa Tualang ini, pada tahun 2012 telah membuat beberapa peraturan desa yaitu:

1. Peraturan Desa tentang Pasar. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban pasar yang ada di Desa Tualang.
2. Peraturan Desa tentang pelaksanaan acara bersih desa yang diadakan satu bulan sekali. Acara bersih desa bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Biasanya akan ada penjelasan tentang waktu dan proses pelaksanaan dari acara bersih desa ini dan siapa saja orang yang akan ditunjuk untuk memimpin acara tersebut.

Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dari fungsinya Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, melalui tanggapan dari responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Sudahkah BPD Membuat Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Sudah	11	9,40%
	Belum	-	-
	Tidak Tahu	-	-
Aparat Desa	Sudah	8	6,83%
	Belum	1	0,85%
	Tidak Tahu	-	-
Masyarakat	Sudah	15	12,82%
	Belum	51	43,58%
	Tidak Tahu	31	26,49%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum membuat peraturan-peraturan desa yaitu sebanyak 52 orang atau (44,44%) dari keseluruhan responden baik dari masyarakat maupun aparat desa, sedangkan dari anggota BPD keseluruhan responden mengatakan sudah membuat peraturan desa yaitu sebanyak (9,40%). Dari hasil penelitian di lapangan peneliti

menemukan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya untuk menghadiri rapat BPD, sehingga asumsi masyarakat lebih kepada belum adanya peraturan yang dibuat oleh BPD padahal pada kenyataannya sudah terdapat beberapa peraturan yang telah ditetapkan seperti peraturan desa tentang pasar.

Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Tahu	9	7,69%
	Kurang Tahu	2	1,70%
	Tidak Tahu	-	-
Aparat Desa	Tahu	6	5,12%
	Kurang Tahu	3	2,56%
	Tidak Tahu	-	-
Masyarakat	Tahu	28	23,93%
	Kurang Tahu	43	36,75%
	Tidak Tahu	26	22,22%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 117 responden, mayoritas mengatakan bahwa pengetahuan mereka tentang pembuatan peraturan desa masih dalam kategori Kurang Tahu, yaitu sebanyak 48 orang 41,02% dari keseluruhan responden dengan klasifikasi dari anggota BPD sebanyak 2 orang (1,70%), dari Aparat Desa sebanyak 3 orang (2,56%) dan masyarakat sebanyak 43 orang (36,75%). Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan yaitu yang membuat rendahnya pengetahuan responden mengenai pembuatan peraturan desa adalah kurangnya sosialisasi BPD dalam memberikan informasi tentang sistematika atau tata cara pembuatan Peraturan Desa. Seharusnya masyarakat harus lebih berperan aktif di dalam pembuatan peraturan desa tersebut.

Adapun contoh peraturan desa yang telah dibuat adalah:

1. Peraturan Desa tentang Pasar. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mewujudkan ketertiban pasar yang ada di Desa Tualang.

Tabel 5.8 Tanggapan Responden Tentang Keikutsertaan Dalam Rapat Yang Dilakukan Oleh BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Selalu	11	9,40%
	Kadang-Kadang	-	-
	Tidak Pernah	-	-
Aparat Desa	Selalu	7	5,98%
	Kadang-Kadang	2	1,70%
	Tidak Pernah	-	-
Masyarakat	Selalu	4	3,41%
	Kadang-Kadang	53	45,29%
	Tidak Pernah	40	34,18%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka menjawab bahwa hanya sesekali mengikuti rapat yang di adakan oleh BPD, yaitu sebanyak 55 orang atau sekitar 47% dengan klasifikasi dari BPD tidak ada, dari Aparat Desa 2 orang (1,70%), dan dari masyarakat sebanyak 53 orang (45,29%). Dari hasil penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi, serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rapat yang dilakukan oleh BPD, seperti tidak adanya kantor atau gedung rapat yang tetap untuk mengadakan kegiatan rapat tersebut.

Tabel 5.9 Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Bulan	Undangan	Jumlah	Hadir	Tidak Hadir
1	Januari 2012	Anggota BPD	11	6	5
		Aparat Desa	9	4	5
		Masyarakat	50	22	28

2	April 2012	Anggota BPD	11	5	6
		Aparat Desa	9	3	6
		Masyarakat	50	31	19
3	Juli 2012	Anggota BPD	11	7	4
		Aparat Desa	9	5	4
		Masyarakat	50	24	26

Sumber: Kantor BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kab. Siak 2012

Dari tabel diatas dilihat dan diketahui bahwa dalam tiga kali kegiatan rapat terakhir, jumlah yang hadir lebih kecil dari yang tidak hadir. Hal ini disebabkan kurangnya hubungan komunikasi diantara sesama anggota BPD, Aparat Desa serta masyarakat, sehingga terjadi kevakuman dan tentunya bisa menghambat pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Hasil Peraturan Yang Telah Ditetapkan

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Baik	10	8,54%
	Kurang Baik	1	0,85%
	Tidak Baik	-	-
Aparat Desa	Baik	8	6,83%
	Kurang Baik	1	0,85%
	Tidak Baik	-	-
Masyarakat	Baik	12	10,25%
	Kurang Baik	72	61,53%
	Tidak Baik	13	11,11%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hasil dari peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD masih dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 74 orang atau 63,24% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD dan Aparat Desa masing-masing sebanyak 1 orang dan masyarakat 72 orang (61,53%). Dari informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, bahwa setelah peraturan desa dirumuskan dan ditetapkan, tetapi pelaksanaan dari peraturan desa tersebut belum

dilaksanakan secara maksimal sehingga hasil yang telah ditetapkan dan diinginkan dari penetapan peraturan desa tersebut belum dapat terlihat dengan nyata.

Hasil dari peraturan desa yang telah ditetapkan adalah peraturan desa tentang pasar desa. Bahwa setiap hari Minggu pasar selalu dihadirkan, agar masyarakat mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pedagang yang terdiri dari masyarakat sekitar diperbolehkan berjualan di area pasar yang sudah ditetapkan tersebut, dan dari hasil rapat yang telah ditetapkan, setiap pedagang dikenakan retribusi untuk keamanan dan kebersihan sebesar Rp. 10.000.

Tabel 5.10 Tanggapan Responden Mengenai Hubungan Koordinasi Antara BPD dengan Aparat Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Baik	8	6,83%
	Kurang Baik	3	2,56%
	Tidak Baik	-	-
Aparat Desa	Baik	5	4,27%
	Kurang Baik	4	3,41%
	Tidak Baik	-	-
Masyarakat	Baik	23	19,65%
	Kurang Baik	44	37,60%
	Tidak Baik	30	25,64%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hubungan koordinasi antara BPD dengan Aparat Desa masih dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 51 orang atau 43,58% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 3 orang (2,56%), Aparat Desa 4 (3,41%) orang dan masyarakat 44 orang (61,53%). Dari penelitian di lapangan, mereka berpendapat bahwa hal ini dikarenakan oleh kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak Aparat Desa dan BPD, sehingga terkadang hanya sebagian kecil dari BPD atau sebagian kecil dari Aparat Desa

saja yang menghadiri rapat-rapat atau kegiatan lainnya. Hal ini merupakan indikasi dari kurangnya hubungan koordinasi antara BPD dan Aparat Desa.

Tabel 5.11 Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Penetapan Peraturan Dengan Masalah Yang Ada

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Tahu	7	5,98%
	Kurang Tahu	4	3,41%
	Tidak Tahu	-	-
Aparat Desa	Sudah	5	4,27%
	Belum	3	2,56%
	Tidak Tahu	1	0,85%
Masyarakat	Sudah	9	7,69%
	Belum	78	66,66%
	Tidak Tahu	10	8,54%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa setiap peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan Aparat Desa masih Belum sesuai dengan permasalahan yang ada di Desa Tualang yaitu sebanyak 85 orang atau 72,64% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 4 orang (3,41%), Aparat Desa 3 (2,56%) orang dan masyarakat 78 orang (66,66%). Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, hal ini disebabkan karena kurang tanggapnya pihak BPD dan Aparat Desa dalam melihat permasalahan umum yang terjadi pada masyarakatnya. Sehingga peraturan yang dirumuskan dan ditetapkan tersebut belum sesuai dengan masalah yang terjadi di masyarakat.

Tabel 5.12 Tanggapan Responden Mengenai Dampak Positif dari Penetapan Peraturan Desa Untuk Kemajuan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Sudah	10	8,54%
	Belum	1	0,85%
	Tidak Tahu	-	-

Aparat Desa	Sudah	5	4,27%
	Belum	2	1,70%
	Tidak Tahu	2	1,70%
Masyarakat	Sudah	8	6,83%
	Belum	60	51,28%
	Tidak Tahu	29	24,78%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa Belum ada dampak positif yang ditimbulkan dari penetapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD dan Aparat Desa Tualang, yaitu sebanyak 63 orang atau 53,84% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 1 orang (0,85%), Aparat Desa 2 orang (1,70%) orang dan masyarakat 60 orang (51,28%). Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa hal ini dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan yang telah ditetapkan sehingga dampak yang dihasilkan demi kemajuan desa pun juga belum terlihat.

Dari hasil penetapan peraturan desa tentang pasar tersebut, dapat dilihat bahwa memiliki dampak positif sebagai berikut:

1. Terwujudnya pasar sebagai icon desa. Dimana setiap desa memiliki pasar yang berbeda setiap harinya.
2. Terwujudnya kebersihan lingkungan dan ketertiban lingkungan.
Dengan adanya pasar desa, sebagai area untuk berjualan masyarakat, sehingga tempat-tempat umum lainnya tidak terganggu oleh pedagang kaki lima. Karena telah disediakan pasar sebagai area berjualan.

Tabel 5.13 Tanggapan Responden Mengenai Keikutsertaan Dalam Pembuatan Peraturan Desa

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Selalu	5	4,27%
	Kadang-Kadang	5	4,27%
	Tidak Pernah	1	0,85%
Aparat Desa	Selalu	6	5,12%
	Kadang-Kadang	2	1,70%
	Tidak Pernah	1	0,85%
Masyarakat	Selalu	19	16,23%
	Kadang-Kadang	50	42,73%
	Tidak Pernah	28	23,93%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam Pembuatan Peraturan Desa yaitu pada kategori Kadang-Kadang dengan jumlah 57 orang atau 48,71% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 5 orang (4,27%), Aparat Desa 2 orang (1,70%) orang dan masyarakat 50 orang (42,73%), mereka beralasan hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing sehingga sering tidak hadir dalam rapat pembuatan peraturan desa yang diadakan oleh BPD dan Aparat Desa.

Rapat yang diadakan oleh BPD adalah sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian akan dirumuskan menjadi peraturan desa.

Tabel 5.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi dalam Menetapkan Peraturan Desa.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		A	B	C	
1	Sudahkah BPD membuat Peraturan Desa	34	52	31	117
2	Mengetahui cara membuat	43	48	26	117

	Peraturan Desa				
3	Ikut serta dalam rapat	22	55	40	117
4	Hasil peraturan yang ditetapkan	30	74	13	117
5	Koordinasi BPD dengan aparat desa	36	51	30	117
6	Kesesuaian penetapan Peraturan Desa dengan masalah yang ada	21	85	11	117
7	Dampak positif dari penetapan Peraturan Desa	23	63	31	117
8	Ikut serta dalam pembuatan Peraturan Desa	30	57	30	117
Jumlah Rata-Rata		30	61	26	117
Persentase		25,64%	52,13%	22,22%	100%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel rekapitulasi diatas tentang Tanggapan Responden dari indicator Fungsi BPD dalam Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugasnya yaitu menetapkan peraturan desa belum berfungsi dengan baik, hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aparat desa serta masyarakat, yang disebabkan oleh kesibukan masing-masing sehingga dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa hanya melibatkan sebagian anggota BPD dan aparat desa saja. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat kelancaran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya, karena harus melaksanakan rapat pada tempat yang berbeda-beda.

Fakta lain yang membuktikan tidak berjalannya fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa adalah sulitnya mendapatkan

kesepakatan yang bulat dalam menetapkan peraturan yang dilakukan dalam rapat dan seolah-olah dipaksakan. Adapun peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD Desa Tualang ada 3 (tiga) Peraturan Desa yang meliputi: a) Tata Tertib Desa, b) Tata Tertib BPD, c) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sini dapat kita lihat bahwa dari ketiga peraturan desa tersebut semuanya hanya mengacu pada pelaksanaan teknis pemerintahan antara BPD dengan aparat desa, sedangkan peraturan-peraturan desa lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat sama sekali belum pernah ditetapkan. Hal ini menjadikan dasar bagi peneliti untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sebagai pembuat peraturan desa belum berjalan dengan baik.

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi kedua dari Badan Permusyawaratan Desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa. Dengan demikian, aparat desa harus mampu menjalankan fungsi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk melihat tanggapan Responden mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam hal Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.15 Tanggapan Responden Mengenai Pernah atau Tidaknya BPD Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Selalu	11	9,40%
	Kadang-Kadang	-	-
	Tidak Pernah	-	-
Aparat Desa	Selalu	8	6,83%
	Kadang-Kadang	1	0,85%
	Tidak Pernah	-	-
Masyarakat	Selalu	12	10,26%
	Kadang-Kadang	71	60,68%
	Tidak Pernah	14	11,96%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa dalam hal pernah atau tidaknya BPD menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu masih dalam kategori Kadang-Kadang dengan jumlah 72 orang atau 61,53% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD tidak ada, Aparat Desa 1 orang (0,85%) orang dan masyarakat 71 orang (60,68%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini terjadi karena masih banyak aspirasi atau keinginan-keinginan masyarakat yang belum ditampung dan disalurkan oleh BPD kepada instansi yang berwenang.

Dari data yang didapatkan bahwa aspirasi masyarakat yang telah dijadikan sebagai peraturan desa adalah tentang acara bersih desa, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat. Selain itu juga mempererat rasa kekeluargaan dan gotong royong antar masyarakat. Peraturan desa ini hadir karena masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Tabel 5.16 Tanggapan Responden Tentang BPD yang Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menyerap dan Menampung Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Selalu	9	7,69%
	Kadang-Kadang	2	1,70%
	Tidak Pernah	-	-

Aparat Desa	Selalu	8	6,83%
	Kadang-Kadang	1	0,85%
	Tidak Pernah	-	-
Masyarakat	Selalu	6	5,12%
	Kadang-Kadang	65	55,55%
	Tidak Pernah	26	22,22%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa BPD hanya Kadang-kadang atau sesekali turun langsung ke lapangan untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat yaitu sebanyak 69 orang atau 58,97% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 2 orang (1,70%), Aparat Desa juga 2 orang (1,70%) dan masyarakat 65 orang (55,55%). Di dapat informasi bahwa alasannya adalah kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran dari pihak BPD dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka yang kemudian aspirasi tersebut disalurkan kepada pihak atau instansi yang berwenang.

Sebagai wakil masyarakat di tingkat desa, anggota BPD di desa tualang telah berusaha menampung aspirasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Komunikasi secara lisan antara masyarakat dengan anggota BPD, dimana masyarakat mengeluarkan pendapat mereka yang berkaitan tentang kemajuan desa dan lain sebagainya.
2. Kotak saran yang telah disediakan di kantor desa, dimana masyarakat bebas menuliskan aspirasi mereka.

Tabel 5.17 Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Instansi Yang Berwenang

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
-----------	---------	-----------	------------

BPD	Sudah	8	6,83%
	Sedikit	3	2,56%
	Tidak Pernah	-	-
Aparat Desa	Sudah	5	4,27%
	Sedikit	3	2,56%
	Tidak Pernah	1	0,85%
Masyarakat	Sudah	13	11,11%
	Sedikit	56	47,86%
	Tidak Pernah	28	23,93%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada instansi yang berwenang yaitu sebanyak 62 orang atau 52,99% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 3 orang (2,56%), Aparat Desa juga 3 orang (5,26%) dan masyarakat 56 orang (47,86%). Hal ini terjadi karena kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana hal tersebut ditandai dengan belum sepenuhnya aspirasi masyarakat yang terealisasi dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat desa maupun aparat yang jenjangnya lebih tinggi dari desa.

Dari data yang didapatkan bahwa aspirasi masyarakat yang telah disalurkan oleh BPD adalah pengadaan puskesmas desa. Keberadaan puskesmas ini dimaksudkan untuk penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Walaupun sebenarnya puskesmas kecamatan tidak berada jauh dari desa Tualang ini, tetapi keberadaan puskesmas sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat.

Tabel 5.18 Tanggapan Responden Tentang Kinerja BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
-----------	---------	-----------	------------

BPD	Baik	11	9,40%
	Kurang Baik	-	-
	Tidak Baik	-	-
Aparat Desa	Baik	1	0,85%
	Kurang Baik	6	5,12%
	Tidak Baik	2	1,70%
Masyarakat	Baik	3	2,56%
	Kurang Baik	61	52,13%
	Tidak Baik	33	28,20%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih termasuk dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 67 orang atau 57,26% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD tidak ada yang menjawab Kurang Baik, dari Aparat Desa 6 orang (5,12%) dan masyarakat 61 orang (52,13%). Dari hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan penyebabnya adalah kurangnya inisiatif dari pihak BPD dalam melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang dapat menampung aspirasi masyarakat yang kemudian dapat disalurkan kepada pihak atau instansi yang berwenang.

Sebagai wakil rakyat di tingkat desa, BPD selalu melakukan yang terbaik di dalam pelaksanaan tugasnya. Terlepas dari hal itu, terdapat juga kendala yang dihadapi oleh BPD, seperti ketidakhadiran masyarakat didalam kegiatan rapat sehingga menghambat pencapaian program desa yang telah ditetapkan.

Tabel 5.19 Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Baik	9	7,69%
	Kurang Baik	1	0,85%
	Tidak Baik	1	0,85%
	Baik	-	-

Aparat Desa	Kurang Baik	8	6,83%
	Tidak Baik	1	0,85%
Masyarakat	Baik	2	1,70%
	Kurang Baik	59	50,42%
	Tidak Baik	36	30,76%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa Pelaksanaan Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 68 orang atau 58,11% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 1 orang (0,85%), dari Aparat Desa 8 orang (6,83%) dan masyarakat sebanyak 59 orang (50,42%). Dari pengamatan peneliti, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan Aparat Desa serta Masyarakat, sehingga BPD belum dapat menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat secara maksimal.

Komunikasi di antara masyarakat, anggota BPD, serta aparat desa hendaklah berjalan dengan baik, karena di dalam menjalankan tugasnya BPD tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dan aparat desa. Sehingga jika terjadinya komunikasi yang kurang baik maka pelaksanaan fungsi BPD dalam penyaluran aspirasi pun akan terhambat.

Tabel 5.20 Tanggapan Responden Mengenai Proses Kinerja BPD Ketika Turun Langsung ke Lapangan Untuk Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Baik	7	5,98%
	Kurang Baik	4	3,41%
	Tidak Baik	-	-
Aparat Desa	Baik	1	0,85%
	Kurang Baik	5	4,27%
	Tidak Baik	3	2,56%

Masyarakat	Baik	1	0,85%
	Kurang Baik	5	4,27%
	Tidak Baik	3	2,56%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa Proses kinerja BPD ketika turun langsung ke lapangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih dalam kategori Kurang Baik yaitu sebanyak 83 orang atau 70,94% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 4 orang (3,41%), dari Aparat Desa 5 orang (4,27%) dan masyarakat sebanyak 74 orang (63,24%). Alasannya karena kegiatan ke lapangan untuk menampung aspirasi masyarakat oleh BPD hanya dilakukan sesekali atau sangat jarang dilakukan, hal ini yang menyebabkan masyarakat menilai kinerja BPD kurang baik.

Tabel 5.21 Tanggapan Responden Tentang Tempat Menyalurkan Aspirasi dari Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Tahu	11	9,40%
	Belum Tahu	-	-
	Tidak Tahu	-	-
Aparat Desa	Tahu	9	7,69%
	Belum Tahu	-	-
	Tidak Tahu	-	-
Masyarakat	Tahu	14	11,96%
	Belum Tahu	68	58,11%
	Tidak Tahu	15	12,82%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka yaitu sebanyak 68 orang atau 58,11% responden yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD dan Aparat Desa tidak

ada, dan masyarakat sebanyak 68 orang (58,11%). Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta komunikasi BPD dan aparat desa memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Sebagai wakil masyarakat di tingkat desa, anggota BPD di desa tualang telah berusaha menampung aspirasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Komunikasi secara lisan antara masyarakat dengan anggota BPD, dimana masyarakat mengeluarkan pendapat mereka yang berkaitan tentang kemajuan desa dan lain sebagainya.
2. Kotak saran yang telah disediakan di kantor desa, dimana masyarakat bebas menuliskan aspirasi mereka.

Selain itu tempat penyaluran aspirasi yang paling efektif adalah di dalam rapat yang rutin diadakan oleh BPD, dikarenakan aspirasi yang di keluarkan di dalam rapat dapat di diskusikan bersama. Sehingga aspirasi-aspirasi yang di tampung lebih jelas dan memungkinkan untuk dijadikan peraturan desa seperti keinginan masyarakat.

Tabel 5.22 Tanggapan Responden Tentang Aspirasi Yang Dijadikan Perdes Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Sudah	8	6,83%
	Sedikit	2	1,70%
	Tidak Pernah	1	0,85%
Aparat Desa	Sudah	6	5,12%
	Sedikit	1	0,85%
	Tidak Pernah	2	1,70%
Masyarakat	Sudah	7	5,98%
	Sedikit	70	59,82%
	Tidak Pernah	20	17,09%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang dijadikan perdes oleh Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu sebanyak 73 orang yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 2 orang (1,70%), Aparat Desa orang (0,85%), dan masyarakat sebanyak 70 orang (59,82%). Dari hasil penelitian lapangan hai ini disebabkan karena setiap pelaksanaan rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh BPD beserta Aparat Desa, hanya sebagian kecil dari masyarakat dan pihak Aparat desa yang hadir dalam rapat tersebut, sehingga hanya aspirasi dari mereka saja yang dapat dijadikan perdes, sedangkan masih banyak masyarakat lainnya yang tidak mengikuti rapat yang ingin menyalurkan aspirasinya. Sekali lagi hal ini disebabkan kurangnya informasi dan komunikasi dari pihak-pihak yang terkait.

Tabel 5.23 Tanggapan Responden Mengenai Partisipasi Dalam Memberikan Masukan Atau Aspirasi Kepada BPD

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Selalu	10	8,54%
	Kadang-Kadang	-	-
	Tidak Pernah	1	0,85%
Aparat Desa	Selalu	4	3,41%
	Kadang-Kadang	4	3,41%
	Tidak Pernah	1	0,85%
Masyarakat	Selalu	2	1,70%
	Kadang-Kadang	72	61,53%
	Tidak Pernah	23	19,65%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa partisipasi mereka dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD masih dalam kategori Kadang-kadang yaitu sebanyak

76 orang atau 64,95% orang yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD tidak ada, Aparat Desa 4 orang (3,41%), dan masyarakat sebanyak 72 orang (61,53%). Alasannya yaitu mereka sering tidak hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPD karena kesibukan masing-masing sehingga mereka jarang memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD.

Tabel 5.24 Tanggapan Responden Mengenai Penyaluraan Aspirasi Masyarakat oleh BPD Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat

Responden	Jawaban	Frekuensi	Persentase
BPD	Sudah	4	3,41%
	Sedikit	5	4,27%
	Tidak Pernah	2	1,70%
Aparat Desa	Sudah	7	5,98%
	Sedikit	2	1,70%
	Tidak Pernah	-	-
Masyarakat	Sudah	4	3,41%
	Sedikit	60	51,28%
	Tidak Pernah	33	28,20%
Jumlah		117	99,99%

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari 117 responden, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa sedikit aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh BPD yang sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu sebanyak 67 orang atau 57,26% orang yang mengatakan demikian, dengan klasifikasi dari BPD 5 orang (4,27%), Aparat Desa 2 orang (1,70%), dan masyarakat sebanyak 60 orang (51,28%). Dari hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena kurangnya informasi dan komunikasi baik dari pihak BPD, Aparat Desa maupun masyarakat dalam setiap kegiatan rapat, sehingga banyak masyarakat yang belum dapat menyalurkan aspirasinya sehingga aspirasi yang disalurkan oleh BPD belum sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Tabel 5.25 Rekapitulasi Tanggapan Responden Dari Indikator Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

No	Pertanyaan	Kategori Jawaban			Jumlah
		A	B	C	
1	Pernah atau tidaknya BPD menyalurkan aspirasi masyarakat	31	72	14	117
2	BPD turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat	21	69	27	117
3	Penyaluran aspirasi masyarakat kepada instansi yang berwenang	26	62	29	117
4	Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat	15	67	35	117
5	Pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung aspirasi masyarakat	11	68	38	117
6	Proses kinerja BPD ketika turun langsung ke lapangan	12	83	22	117
7	Tempat menyalurkan aspirasi dari masyarakat	34	68	15	117
8	Aspirasi yang dijadikan Perdes sesuai dengan keinginan masyarakat	15	67	35	117
9	Partisipasi dalam memberikan masukan atau aspirasi kepada BPD	16	76	25	117
10	Penyaluran aspirasi masyarakat oleh BPD sesuai dengan keinginan masyarakat	15	67	35	117
Jumlah Rata-Rata		20	70	27	117
Persentase		17,09%	59,82%	23,07%	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012

Berdasarkan tabel rekapitulasi tentang tanggapan responden dari indikator fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

kurang berjalan dengan baik, dengan alasan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagian kecil yang turun ke lapangan, selain itu kurangnya pendekatan dan kurangnya komunikasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab kurang berjalannya fungsi BPD Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini.

Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat akan keterlibatan mereka dalam semua keputusan maupun penetapan peraturan yang dilakukan oleh BPD juga menjadikan ini sebagai salah satu faktor kurang optimalnya BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat.

Tabel 5.26 Rekapitulasi Angket Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Variabel Penelitian	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Total
1	Merumuskan dan Menetapkan Peraturan	30 (25,64)	61 (50,86)	26 (22,22)	117
2	Menampung dan Menyalurkan Aspirasi	20 (17,09)	70 (59,82)	27 (23,07)	117
Jumlah		50 (21,36)	131 (55,98)	53 (22,64)	234

Sumber : *Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012*

Dari Rekapitulasi angket pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di atas dapat dilihat bahwa:

1. Dari fungsi merumuskan dan menetapkan peraturan desa, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan tanggapan responden yang menyatakan kurang baik yaitu sebanyak 61 orang atau 52,13% , adapun alasan responden

mengenai kurang baiknya kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi merumuskan dan menetapkan peraturan desa adalah karena kurangnya komunikasi antara pihak BPD, aparat desa dan masyarakat yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh BPD. Dengan demikian fungsi BPD dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa belum dapat terlaksana dengan maksimal

2. Dari fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa fungsi tersebut juga belum terlaksana dengan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah responden yang memilih jawaban dengan kategori kurang baik pada angket penelitian yaitu sebanyak 70 orang atau 59,82%, dengan alasan hanya sebagian kecil anggota BPD yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat, sedangkan untuk penyaluran aspirasi ang telah ditampungpun masih dalam kategori kurang baik karena belum ada Peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat.

Jadi akumulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan kedua fungsi BPD sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu yang mengatakan Baik sebanyak 50 atau 21,36%, kemudian yang menjawab Kurang Baik sebanyak 131 atau 55,98% dan yang menjawab Tidak Baik sebanyak 53 atau 22,64%. Kesimpulannya, dari kedua fungsi BPD yaitu Merumuskan dan menerapkan Peraturan Desa serta

Menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat masih belum berjalan sebagaimana mestinya atau masih dalam kategori *Kurang Baik*.

5.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam BPD itu sendiri misalnya:
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung BPD itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara ketua BPD dengan anggotanya serta Aparat Desa dengan masyarakat, dimana hal ini disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing.
 - c. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab anggota BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah

ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Faktor Ekstern, yaitu faktor yang berasal dari luar BPD.
 - a. Kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Tualang terhadap kegiatan-kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BPD, hal ini terlihat dari kurang antusiasnya masyarakat untuk hadir dalam menyampaikan ide-ide atau aspirasi dalam kegiatan rapat BPD.
 - b. Adanya kesalahan anggapan di tengah-tengah masyarakat bahwa hanya Ketua dan Anggota BPD lah yang memiliki wewenang didalam mencetuskan ide-ide dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga mereka tidak mau peduli dan berpartisipasi dalam kegiatan rapat BPD.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu meliputi Fungsi Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan Fungsi Menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Fungsi Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa masih dikategorikan belum berfungsi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terbanyak yaitu sebanyak 61 orang atau (50,86%) responden yang mengatakan demikian dapat dilihat dari tabel 5.14. Hal ini disebabkan kurang terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara BPD dengan Aparat Desa Tualang serta masyarakat yang disebabkan oleh kesibukan mereka masing-masing sehingga dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa hanya melibatkan sebagian anggota BPD, Aparat Desa serta sebagian Masyarakat saja. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana yaang mendukung, sehingga dalam melaksanakan kegiatan rapat dilaksanakan pada tempat yang tidak tetap.

b. Fungsi BPD dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Pelaksanaan Fungsi BPD di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam menampung dan menyalurkan aspirasi juga kurang berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terbanyak yaitu sebanyak 70 orang atau (59,82%) pada tabel 5.25 yang mengatakan demikian karena anggota BPD hanya sebagian kecil yang langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga anggota BPD belum dapat melaksanakan fungsi kedua ini dengan optimal. Selain kurangnya komunikasi serta koordinasi antara ketiga unsur yaitu BPD, aparat desa dan masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat belum dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya juga kesadaran dan partisipasi masyarakat yang dinilai kurang demi terlaksananya tugas dan fungsi BPD dengan maksimal.

Adapun yang menjadi penyebab kurang optimalnya pelaksanaan fungsi BPD adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota BPD untuk selalu ikut serta dalam menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD itu sendiri.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya, seperti gedung rapat yang tetap, komputer, meja, kursi dan lain-lain.

3. Kurang kesadaran dan tanggung jawab dari aparat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan rapat yang diadakan oleh BPD.
4. Kurang partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh BPD.
5. Kurangnya komunikasi antara pihak BPD, Aparat Desa serta masyarakat yang menyebabkan minimnya penyebaran informasi mengenai tempat serta jadwal kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
6. Kesibukan dari masing-masing pihak, baik itu anggota BPD, aparat desa maupun masyarakat yang menyebabkan ketidak hadirannya mereka dalam rapat yang diadakan oleh BPD.

6.2 Saran

Adapun saran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah:

1. Perlu adanya pembinaan komunikasi dan koordinasi antara BPD, aparat desa dan masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPD akan mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat, aparat desa serta anggota BPD itu sendiri. Dengan demikian semua aspirasi dari masyarakat dapat ditampung dan kemudian dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang dan menjadi suatu kebijakan.
2. Perlu adanya pembinaan Sumber Daya Manusia dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tualang, sehingga setiap anggota memiliki skill dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar setiap

aspirasi dan penerapan peraturan dari BPD dapat diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

3. Agar pelaksanaan tugas dan fungsinya berjalan dengan baik maka harus didukung dengan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat membantu menyediakan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan BPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, 2002. *Otonomi Daerah*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anwar Khairul, 2003. *Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah*, UNRI Pers, Pekanbaru.
- Budihardjo Miriam, 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nazir Muhammad, 2004. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Grafindo, Jakarta.
- Ndraha Taliziduha, 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Rasyid Ryas, 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santosa Budi, 2003. *Desa Dan Pemerintahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Santowo Purwo, 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setyawan Dharma, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1991. *Sosiologi Sebagai Suatu Pendekatan Perilaku*, Sinar Baru, Bandung.
- Sumadilaga Ruman, 2007. *Peradaban Sosiologi Peresaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjan, Selo, 2003. *Perkembangan Kehidupan Pedesaan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutoro, Eko, 2003. *Pembaharuan Pemerintahan Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah

The Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Thoha Miftah, 2005. *Kepemimpinan Dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru, Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah

Widjaja Haw, 2005. *Pemerintahan Desa Marga*, Grafindo Persada, Jakarta.